

**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**

**KECAMATAN NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN**

TAHUN 2011

**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(L A K I P)**

**KECAMATAN NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN
*TAHUN 2011***

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kecamatan Ngimbang merupakan salah satu Kecamatan yang ada dibelahan selatan dari Kabupaten Lamongan dengan luas wilayah 8.993,26 Ha dan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu lahan pertanian seluas 3.842,395 Ha dan lahan hutan seluas 3.678.889 Ha; Jumlah Penduduk sebanyak 46.429 jiwa, dengan jumlah 10.638 Kepala Keluarga (KK) dan rata-rata kepadatan penduduk 515 orang/km2.

Kantor Camat Ngimbang merupakan type C dengan jumlah staf sebanyak 19 orang dan jumlah jabatan structural 8 (delapan) jabatan.

Tujuan Kecamatan Ngimbang

1. Terlaksananya Penyelenggaraan Tugas-tugas Pemerintahan Umum, Pembinaan Keagranian, Politik Dalam Negeri dan Pemerintahan Desa, sehingga Tercipta Peningkatan Mutu Relayanan kepada Masyarakat;
2. Terwujudnya Pembangunan di bidang : Perekonomian, Produksi dan Distribusi serta Sosial Budaya, lewat pemberdayaan masyarakat
3. Terciptanya Suasana/ Kondisi yang Aman, Tertib dan Tentram serta Kondusif;
4. Terwujudnya Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Sosial masyarakat;

Dengan sasaran

1. Meningkatkan pengelolaan tata kearsipan di lingkup Kecamatan Ngimbang
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) staf Kecamatan Ngimbang
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Rapat kerja maupun Rapat Koordinasi baik
4. Perangkat Desa maupun Instansi terkait
5. Memelihara Kepercayaan Masyarakat kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan secara baik dan benar (Good Governance)
6. Mengoptimalkan system Pengendalian dan Pengawasan yang ada.

Langkah-langkah yang diambil

1. Melaksanakan Bimbingan Tehnik untuk operator computer baik di bagian pelayanan maupun bagian program dan anggaran SKPD
2. Mengoptimalkan pelaksanaan rapat koordinasi dengan UPT Dinas maupun dengan Aparat Desa
3. Mengoptimalkan rapat staf untuk memacu pelaksanaan program dan sebagai ajang inspeksi atas program yang telah dilaksanakan

Demikian Ikhtisar Eksekutif yang dapat disajikan, sebagai Laporan dan gambaran umum SKPD Kecamatan Ngimbang akan Rencana dan Pelaksanaan Program yang telah dicanangkan Tahun Anggaran 2011 .

KATA PENGANTAR

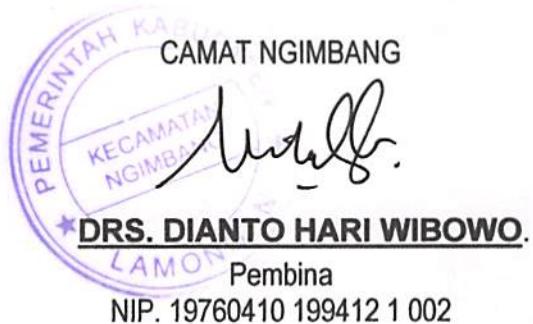
Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT atas Limpahan Rahmad dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2011 unit kerja Kantor Kecamatan NGIMBANG dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2011 disusun atas dasar Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ,sebagai wujud pertanggungjawaban secara sistematis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan NGIMBANG Kabupaten Lamongan sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LAKIP ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu demi sempurnanya laporan serupa di tahun mendatang sehingga harapan akhir bahwa dengan melihat LAKIP, seseorang atau badan hukum akan dengan mudah mengetahui keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi dapat terwujud, kami sangat berterima kasih apabila terdapat saran.

Kami berharap mudah-mudahan Laporan yang sederhana ini ada guna dan manfaatnya, dan akhirnya kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridlo pengabdian kita kepada Bangsa dan Negara, Amien.

Ngimbang, Januari 2012



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Analis Perkembangan Strategi	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
A. Rencana Stratejik	8
1. Visi	8
2. Misi	8
3. Tujuan	8
4. Sasaran	8
B. Rencana Kinerja Tahun 2012	9
1. Sasaran dan Indikator Sasaran	9
2. Program	11
3. Kegiatan dan Indikator Kegiatan	11
C. Perjanjian Kinerja	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
a. Pengukuran Kinerja	14
b. Evaluasi Kinerja	15
c. Analisis Akuntabilitas Kinerja	17
d. Akuntabilitas Keuangan	21
BAB IV PENUTUP	22

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- Rencana Strategis (RS)
- Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- Penetapan Kinerja
- Pengukuran Kinerja

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kecamatan NGIMBANG merupakan salah satu dari 27 (dua puluh tujuh) kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan, bahwa Kecamatan sebagai unsur Staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangan yang dilimpahkan Kepala Daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial serta pembinaan ketentraman dan ketertiban.

Dasar Hukum penyusunan Lakip ini adalah :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apatur Negara Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 589/IX/6/1999 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/8/1999 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**2.1 Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Ngimbang**

Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Seksi Pejabat Eselon di bawah camat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. CAMAT**a. Tugas :**

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan kentruman dan ketertiban umum
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa

b. Fungsi :

Selain tugas tersebut, Camat mempunyai kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian otonomi daerah yang meliputi :

1. Perijinan
2. Rekomendasi
3. Koordinasi
4. Pembinaan
5. Pengawasan
6. Fasilitasi
7. Penetapan
8. Penyelenggaraan dan
9. Kewenangan lain yang dilimpahkan
10. Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undang
11. Pelimpahan sebagian wewenang Kepala Daerah kepada Camat sebagaimana dimaksud di atas dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi
12. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah di Wilayah kerja Kecamatan .

2. SEKRETARIS KECAMATAN**a. Tugas :**

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis penyiapan program, pengelolaan perpustakaan, kehumasan, keuangan dan perlengkapan. Kepegawaian, tata usaha, protocol dan rumah tangga

b. Fungsi :

- Mengumpulkan, menelaah dan menganalisa serta penyajian data statistic dan informasi dalam rangka penyimpan bahan perumusan koordinasi serta bahan pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan kebijaksanaan teknis penyusunan program pengolahan keuangan dan umum .
- Menyusun administrasi perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan dalam rangka penyusunan program pengelolaan keuangan
- Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Camat

3. SEKSI PEMERINTAHAN**a. Tugas**

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis di bidang Pemerintahan .

b. Fungsi

- Mengumpulkan, menelaah dan menganalisa data serta menyajikan data statistic dan informasi dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis di bidang Pemerintahan
- Mengurus tugas operasional dan administrasi perumusan, teknis koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis di bidang Pemerintahan yang meliputi :
 1. Pemerintahan Umum dan Desa
 2. Kependudukan dan Catatan Sipil
 3. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 4. Pertanahan dan Perangkat Daerah
 5. Pemilihan Umum, Ideologi Negara, Kesatuan Bangsa, Orsos, Opol dan Ormas
 6. Pendapatan Daerah
 7. Perjinian dan Pelayanan Umum Bidang Pemerintahan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat

4. SEKSI PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN**a. Tugas**

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis di bidang Perekonomian dan Pembangunan

b. Fungsi

- Mengumpulkan, menelaah dan menganalisa data serta menyajikan data statistic dan informasi dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis di bidang Perekonomian dan Pembangunan
- Mengurus tugas operasional dan administrasi perumusan, teknis koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis di bidang Perekonomian dan Pembangunan yang meliputi :
 1. Industri dan perdagangan
 2. Perbankan dan perkreditan
 3. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 4. Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

5. Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi serta Lingkungan hidup
6. Perhubungan, Pariwisata, Pos dan Telokomunikasi, Pemberian perijinan dan pelayanan Umum dibidang Perekonomian dan Pembangunan

➤ Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat

5. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

a. Tugas

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

b. Fungsi

- Mengumpulkan, menelaah dan menganalisa data serta menyajikan data statistic dan informasi dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Mengurus tugas operasional dan administrasi perumusan, teknis koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang meliputi :
 1. Pendidikan, Pemuda, Olah raga dan Kebudayaan
 2. Kesehatan dan Keluarga Berencana
 3. Pemberdayaan Perempuan, Sosial dan Agama
 4. Pemberian Perijinan dan Pelayanan umum di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat

5. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

➤ Tugas

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis dibidang Ketentraman dan Ketertiban umum

➤ Fungsi

- Mengumpulkan, menelaah dan menganalisa data serta menyajikan data statistic dan informasi dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis di bidang Ketentraman dan Ketertiban umum
- Mengurus tugas operasional dan administrasi perumusan, teknis koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis di bidang Ketentraman dan Ketertiban umum yang meliputi :
 1. Pembinaan dan Penertiban Perijinan
 2. Penegakan Peraturan Daerah dan Perundang-undangan lain
 3. Pengendalian Operasional Polisi Pamong Praja
 4. Kesiagaan perlindungan Masyarakat, Penyelamatan dan Penanggulangan bencana alam
 5. Evaluasi dan pelaporan dibidang Ketentraman dan Ketertiban umum
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat

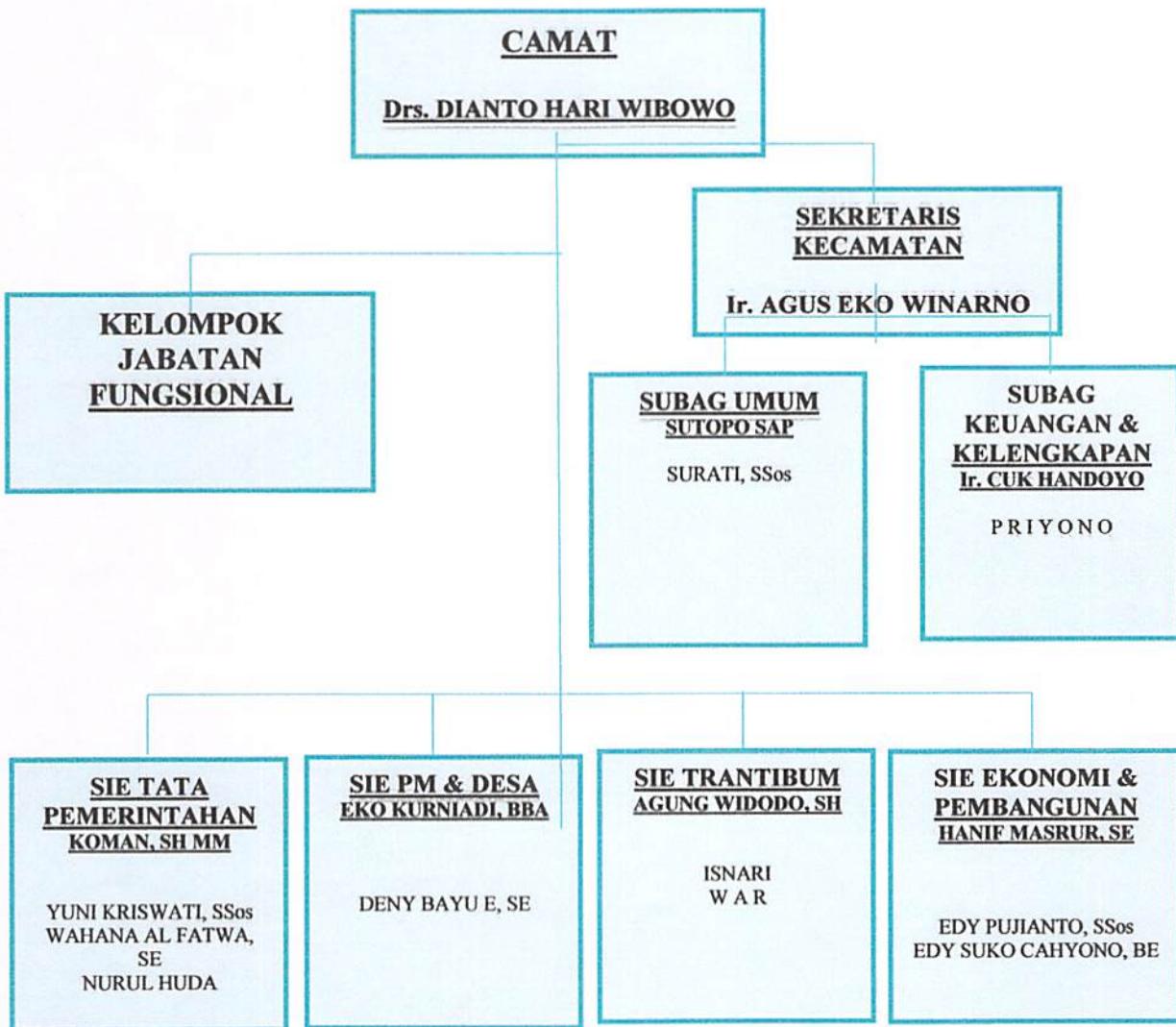
6. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

➢ Tugas

Melaksanakan kegiatan bidang jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

2.2 Struktur Organisasi Kecamatan Ngimbang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 49 Tahun 2008 Susunan Organisasi Kecamatan Ngimbang dapat digambarkan sebagai berikut :



2.3 Sumber Daya SKPD Ngimbang

1. PERSONIL :

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Sekretariat Kecamatan Ngimbang secara keseluruhan adalah sebanyak 17 (Tujuh belas) orang, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Camat : 1 orang ;
- b. Sekretaris Kecamatan : 1 (satu) orang ;

- c. Kepala Seksi : 4 (empat) yaitu HANIF MASRUR,SE, jabatan Kasi EKBANG EKO KURNIADI,BBA jabatan Kasi PMD, KOMAN, SH.MM Jabatan Kasi TATA PEMERINTAHAN, AGUNG WIDODO, SH Jabatan KASI TRANTIB
- d. Sub. Bagian : 2 (dua) orang; Yaitu SUTOPO, SAP Jabatan Sub BAG. UMUM, Ir. CUK HANDOYO Jabatan Sub. BAG. KEUANGAN & PERLENGKAPAN
- e. Staf : 9 (sembilan) orang

C. ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEGIS

Dalam upaya pencapaian tugas pokok dan fungsi di atas terdapat hal-hal yang mendukung dan kemungkinan sebaliknya. Dalam kaitan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. KEKUATAN :

- a. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan ;
- b. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat ;
- c. Memberdayakan Perangkat Daerah yang ada di Sekretariat Kecamatan ;
- d. Sarana dan prasarana kerja memenuhi syarat ;
- e. Partisipasi dan peran aktif masyarakat cukup tinggi ;
- f. Terdapatnya Instansi dan UPT Dinas tingkat Kecamatan ;
- g. Tersedianya Unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di semua desa ;

2. KELEMAHAN :

- a. Sumber Daya Perangkat Daerah belum seimbang dengan tuntutan era global dan jumlahnya yang sedikit jika dibandingkan dengan jumlah desa yang ada
- b. Sumber Daya Penyelenggara Pemerintahan Desa relatif rendah ;
- c. Standar mentalitas Pamong Praja belum ada ;
- d. Masih adanya rasa egoisme sektoral Instansi dan UPT Dinas ;
- e. Kesejahteraan PNS dan Unsur Pemerintah Desa perlu ditingkatkan ;
- f. Camat tidak memiliki kewenangan untuk mengambil sanksi terhadap Perangkat Desa.

3. TANTANGAN / ANCAMAN :

- a. Tuntutan masyarakat terhadap kinerja Aparatur penyelenggara Pemerintahan semakin tinggi ;
- b. Penyelenggaraan Pemerintahan yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;
- c. Pelayanan Prima ;
- d. Globalisasi .

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategik

1. Visi

Merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan cita yang ingin diwujudkan melalui proses refleksi dan proyeksi yang diambil dari nilai-nilai luhur masyarakat.

Visi Kecamatan Ngimbang adalah :

“**TERWUJUDNYA PENINGKATAN PELAYANAN SECARA CEPAT, TEPAT DAN CERMAT”**

2. Misi

Merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya .

Misi Kecamatan Ngimbang adalah :

- a. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Umum ;
- b. Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa ;
- c. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat ;
- d. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Melalui Pelayanan Umum di Bidang Kesejahteraan Sosial ;
- e. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Kehidupan Bermasyarakat .

3. Tujuan :

- a. Meningkatkan kualitas administrasi umum Kecamatan ;
- b. Meningkatkan kualitas bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa ;
- c. Meningkatkan efektifitas perencanaan dan pengendalian pembangunan ;
- d. Meningkatkan kualitas kehidupan warga miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial ;
- e. Meningkatkan ketertiban kehidupan bermasyarakat.

4. SASARAN

- a. Meningkatnya pengelolaan administrasi surat-menyerat di lingkup Kecamatan NGIMBANG ;

- b. Meningkatnya kualitas pelaksanaan rapat kerja dengan instansi dan UPT Dinas tingkat Kecamatan dan pelaksanaan Rapat Kerja Kades, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ;
- c. Meningkatnya efektifitas perencanaan dan pengendalian maupun evaluasi pembangunan di Kecamatan NGIMBANG ;
- d. Menurunnya masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial dan meningkatnya kesejahteraan warga miskin ;
- e. Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Rencana Kinerja Tahun 2011

Merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Unit Kerja Kantor Kecamatan NGIMBANG melalui kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja dimaksud ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi Unit Kerja Kecamatan NGIMBANG untuk mencapainya dalam tahun 2011. Agar lebih spesifik, dapat dirangkum sebagai berikut :

1. Sasaran dan Indikator Sasaran

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3
1	Meningkatnya pengelolaan administrasi surat-menurut di lingkup Kecamatan NGIMBANG,	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah surat masuk dan keluar yang ditangani ; b. Jumlah laporan kepegawaian dan laporan barang daerah ; c. Pembinaan administrasi umum ; d. Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS ; e. Administrasi keuangan dan pembayaran gaji serta perlenggong jawabannya
2	Meningkatnya kualitas pelaksanaan rapat kerja dengan instansi dan UPT Dinas tingkat Kecamatan dan pelaksanaan Rapat Kerja Kades, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta kegiatan pemerintahan lainnya,	<ul style="list-style-type: none"> 1) Jumlah rapat koordinasi dengan Ka.UPT Dinas/instansi ; 2) Jumlah rapat kerja dengan Kades, BPD dan Perangkat Desa ; 3) Intensitas Pembinaan administrasi dan aparat Pemerintahan Desa ; 4) Tersalurnya TPAPD bagi Kades dan Perangkat Desa, Tunjangan bagi BPD, tunjangan Asuransi bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan puma bhakti Kepala Desa dan Perangkat Desa ; 5) Pelayanan administrasi kepandudukan, pemerintahan, keagrariaan dan pembinaan ketekembagaan di desa ; 6) Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa yang transparan.

1		
3	Meningkatnya efektivitas perencanaan dan pengendalian maupun evaluasi Kajian Rapat Koordinasi dengan pembangunan di Kecamatan NGIMBANG	1) Jumlah Rapat Koordinasi dengan pembangunan ; 2) Frekuensi pengawasan pelaksanaan pembangunan ; 3) Frekuensi pelaporan pelaksanaan pembangunan ; 4) Terbangunnya sarana dan prasarana fisik desa di dalam APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten ; 5) Usulan pembangunan sarana fisik desa dalam menopang kemajuan desa
4	Menurunnya masarakat penyandang masalah keselaheran sosial dan meningkatnya keselaheran warga miskin pendistribusian RASKIN :	1) Frekuensi pembangunan dan 2) Petaruran Surat pemohonan bantuan sarana lokal ; 3) Petaruran Pendistribusian dana BLT dan memberikan bea siswa bagi RTM ; 4) Pembinaan ketemagauan lokal di desa ; 5) Pengurus an pemdaslahan lokal di desa.
5	Meningkatnya susaha yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasarakat	1) Jumlah pemantauan KMTIBMAS design apart kemasan ka desa ; 2) Frekuensi inspeksi koperllian jln usaha/HQ dan seletisnya ke perusahan penushaan yang ada di kecamatan NGIMBANG ; 3) Optimalisasi perlusinan pajaik dan retribusi daerah ; 4) Pemantauan dan pembekalan bantuan pembangunan ; 5) Keamanan dan pengamanan Kantor dan kunjungan tamu-tamu pemerkirahan kutuungan tama-tamu lainnya ; 6) Operasi pengawakan Peraturan Desa.

2. Program

NO	PROGRAM
1	2
1	Peningkatan kualitas administrasi umum Kecamatan ;
2	Peningkatan administrasi sistem kependudukan dan pelayanan Akte Catatan Sipil, maupun peningkatan kualitas pembinaan kepada unsur Pemerintahan Desa ;
3	Peningkatan perencanaan dan pengendalian pembangunan ;
4	Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat ;
5	Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

3. Kegiatan dan Indikator Kegiatan

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
1	2	3
1	Pengurusan administrasi Ketatausahaan, Kepegawaian, Perlengkapan dan Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none"> 1) Jumlah Surat masuk dan keluar ; 2) Jumlah Laporan Kepegawaian ; 3) Jumlah Barang Inventaris Yang dilaporkan ; 4) Jumlah PNS yang naik pangkat dan diusulkan kenaikan pangkatnya ; 5) Administrasi keuangan dan pelayanan gaji dan tunjangan pegawai.
2	Pengurusan Pemerintahan Umum dan fasilitasi Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> 1) Rapat koordinasi dengan Instansi / UPT Dinas se Kec. NGIMBANG ; 2) Rapat kerja dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ; 3) Fasilitasi Penyelesaian Peraturan Desa dan LPJ Kepala Desa ; 4) Fasilitasi penerimaan dan pengadministrasian TPAPD bagi Kades dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD ; 5) Pelaksanaan proses pengangkatan perangkat desa ; 6) Pelayanan administrasi kependudukan, pemerintahan, pembinaan kelembagaan desa dan keagamaan ; 7) Pengurusan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta keuangan lain dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

Sasaran strategis Kecamatatan Ngimbang ditetapkan dengan tetap mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2015 dengan indikator sasaran, Program Kegiatan, dan indikator kegiatan sebagaimana dalam Penetapan Kinerja

C. Pengaruh Kinerja

1	2	3	3	5
Penggunaan Rapat Koordinasi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan UPT Dinas se Kecamatatan ; jumlah laporan kegiatan pembangunan ; 3) Terbagunnya sarana dan prasarana halik desa yang berjumlah dana APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten ;	Penggunaan dan fasilitasi pembangunan sarana fisik desa	Fasilitasi / pemantauan distribusi beras untuk KK miskin/RASKIN ; Rilesoran pemerintama RASKIN ; Fasilitasi panduan masyarakat miskin yang baru bekerja sama dengan BPs ; Penggunaan lembaran sosial dan pemasangan sosial lainnya yang ada di desa.	1) jumlah pemantauan KAMTBMAS dengan ketertiban maupun pengelakuan Periliran Daerah ; yang ada di Kecamatatan NGIMBANG ; Optimalisasi pelunasan pajak dan retibusi daerah ; Persipalan dan upaya perlindungan tetap pada seluruh desa di desa ;	1) jumlah pemantauan Silensi dan kondisi ketertiban dan penggunaan pemungutan suara yang ada di desa ; yang ada di Kecamatatan NGIMBANG ; Optimalisasi pelunasan pajak dan retibusi daerah ; Persipalan dan upaya perlindungan tetap pada seluruh desa di desa ;
Penggunaan dan fasilitasi distribusi RASKIN : KK miskin/RASKIN ; Rilesoran pemerintama RASKIN ; Fasilitasi panduan masyarakat miskin yang baru bekerja sama dengan BPs ; Penggunaan lembaran sosial dan pemasangan sosial lainnya yang ada di desa.	1) Penggunaan dan fasilitasi distribusi RASKIN : KK miskin/RASKIN ; Rilesoran pemerintama RASKIN ; Fasilitasi panduan masyarakat miskin yang baru bekerja sama dengan BPs ; Penggunaan lembaran sosial dan pemasangan sosial lainnya yang ada di desa.	1) jumlah pemantauan KAMTBMAS dengan ketertiban maupun pengelakuan Periliran Daerah ; yang ada di Kecamatatan NGIMBANG ; Optimalisasi pelunasan pajak dan retibusi daerah ; Persipalan dan upaya perlindungan tetap pada seluruh desa di desa ;	1) jumlah pemantauan Silensi dan kondisi ketertiban dan penggunaan pemungutan suara yang ada di desa ; yang ada di Kecamatatan NGIMBANG ; Optimalisasi pelunasan pajak dan retibusi daerah ; Persipalan dan upaya perlindungan tetap pada seluruh desa di desa ;	1) jumlah pemantauan Silensi dan kondisi ketertiban dan penggunaan pemungutan suara yang ada di desa ; yang ada di Kecamatatan NGIMBANG ; Optimalisasi pelunasan pajak dan retibusi daerah ; Persipalan dan upaya perlindungan tetap pada seluruh desa di desa ;
3) Pembangunan ; jumlah laporan kegiatan pembangunan ; Terbagunnya sarana dan prasarana halik desa yang berjumlah dana APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten ;	1) Penggunaan dan fasilitasi pemungutan suara yang ada di desa	1) Penggunaan dan fasilitasi pemungutan suara yang ada di desa	1) Penggunaan dan fasilitasi pemungutan suara yang ada di desa	1) Penggunaan dan fasilitasi pemungutan suara yang ada di desa

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Secara umum SKPD Kecamatan Ngimbang dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai pelaksana pembangunan sebagai pelaksana pembangunan di wilayah Kecamatan Ngimbang secara proporsional berjalan baik .

Akuntabilitas Kinerja sebagai merupakan gambaran tingkat pencapaian sasaran dari penjabaran visi dan misi yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan .

Sasaran yang dipilih, ditetapkan dengan indicator sasaran dan indicator kinerja yang merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif berdasarkan Rencana Strategik Kecamatan Ngimbang Tahun 2010-2015 dengan memperhitungkan input, output dan outcome .

a. Pengukuran Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALIASASI	%
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya tertib administrasi umum di Sekretariat Kecamatan NGIMBANG ;	a. Jumlah surat masuk dan keluar yang ditangani ; b. Jumlah laporan kepegawaian ; c. Pembinaan administrasi umum ; d. Pemrosesan kenaikan gaji berkala.	1.985 srt 36 jenis srt 12 kali 3 orang	1.985 srt 36 jenis srt 12 kali 3 orang	100 100 100 100
2	Terciptanya koordinasi yang baik dengan Instansi dan pelaksana terkait maupun dengan unsur Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan semua kegiatan	a. Jumlah rapat koordinasi dengan Kacabdin/Instansi b. Jumlah raker dengan Kades, BPD dan Perangkat Desa ; c. Intensitas Pembinaan administrasi Pemerintahan Desa ; d. Tersalurnya TPAPD bagi Kades & Perangkat Desa dan Anggota BPD e. Terisinya kekosongan perangkat Desa di 6(enam) Desa	12 kali 12 kali 12 kali 12 kali semua kades & PD serta BPD	12 kali 12 kali 12 kali 12 kali semua kades & PD serta BPD	100 100 100 100
3	Terselenggaranya koordinasi pembangunan secara konsisten guna peningkatan perekonomian masyarakat;	a. Jumlah rapat Koordinasi dengan Kacabdin/UPT dan Kades, BPD Tokoh Masyarakat ; b. Freskuensi pengawasan pelaksanaan pembangunan c. Frekuensi pelaporan pelaksanaan pembangunan ; d. Terbangunnya sarana & prasarana fisik desa dari dana APBN, APBD Prop dan APBD Kab.	3 kali 6 kali 12 kali semua desa	3 kali 6 kali 12 kali semua desa	100 100 100 100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
4	Terdapatnya koordinasi peningkatan kesejahteraan masyarakat	a. Tersalumya RASKIN, Kartu JAMKESMAS	2.474 KK miskin	2.474 KK miskin	100
5	Tercapainya peningkatan ketentraman dan ketertiban.	a. Terselenggaranya jaga pos kamling di semua desa sampai tingkat RT ; b. Jumlah laporan situasi dan kondisi kecamatan ; c. Monitoring situasi & kondisi ketentraman & ketertiban di semua desa ; d. Penegakan Peraturan Daerah dan pelunasan pajak dan retribusi daerah .	12 kali 12 kali 12 kali PBB lunas sbl jatuh tempo	12 kali 12 kali 12 kali PBB lunas sbl jatuh tempo	100 100 100 100

b. Evaluasi Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ngimbang pada tahun 2011, secara umum telah dapat dilaksanakan dengan baik, sebagaimana program kerja yang telah ditetapkan. sebagai realisasi kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis pertama terwujudnya tertib administrasi umum, dengan 6 (enam) indicator kinerja yaitu :
 1. Jumlah surat masuk dan keluar ;
 2. Jumlah Laporan keppegawaian ;
 3. Jumlah laporan barang Inventaris ;
 4. Penyusunan Laporan Kinerja & Keuangan
 5. Pelayanan adm. Perkantoran
 6. Peningkatan Sarana & Prasarana , terealisasi 100% .
2. Sasaran kedua Terciptanya koordinasi yang baik dengan Instansi dan pelaksana terkait maupun dengan unsur Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan semua kegiatan dengan 6 (enam) indicator kinerja yaitu :
 1. Rapat koordinasi dengan Cab.Din/UPT se Kecamatan ;
 2. Raker dengan Kades, Perangkat Desa dan BPD serta LPM ;
 3. Penyelesaian perdes dan LPJ Kades ;
 4. Fasilitasi penerimaan TPAPD
 5. Tunjangan BPD
 6. Tunj. Puma Bhakti, terealisasi 100%
3. Sasaran ketiga Terselenggaranya koordinasi pembangunan secara konsisten guna peningkatan perekonomian masyarakat; dengan 5 (lima) indicator kinerja yaitu :
 1. Rapat koordinasi pembangunan dengan Cab.Din/UPT se kecamatan ;
 2. Jumlah laporan kegiatan pembangunan ;
 3. Fasilitasi & monitoring pelaksanaan proyek bantuan ADD dan Bansun;
 4. Stimulan pemb. desa
 5. Monitoring pelaksanaan proyek sistem swakelola dan kontraktual, secara umum terealisasi 100%
4. Sasaran keempat Terjalannya koordinasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan 3 (tiga) indicator kinerja yaitu :
 1. Fasilitasi distribusi RASKIN ;
 2. Pelaporan penerima RASKIN ;
 3. Pembinaan Pemuda & Olah Raga, telah terealisasi 100%

5. Sasaran kelima Tercapainya peningkatan ketentraman dan ketertiban dengan 6 (enam) indicator kinerja yaitu :

1. Kegiatan kamtibmas
2. Jumlah pemantauan KAMTIBMAS dengan aparat keamanan ke desa ;
3. Frekuensi inspeksi ijin usaha/HO dan sejenisnya ke perusahaan-perusahaan yang ada di Kecamatan NGIMBANG ;
4. Optimalisasi pelunasan pajak
5. Retribusi Daerah
6. Pemantauan dan pengawasan distribusi, telah terealisasi 100%

Untuk keterangan lebih lanjut, sebagaimana daftar dibawah ini :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALIASASI	%
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya tertib administrasi umum di Sekretariat Kecamatan NGIMBANG ;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah surat masuk dan keluar ; 2. Jumlah Laporan kepegawaian ; 3. Jumlah laporan barang Inventaris ; 4. Penyusunan Laporan Kinerja & Keuangan 5. Pelayanan adm. Perkantoran 6. Peningkatan Sarana & Prasarana 	1.985 srt 12 4 15.000.000 119.803.000 43.600.000	1.985 srt 12 4 15.000.000 119.803.000 43.600.000	100 100 100 100 100 100
2	Terciptanya koordinasi yang baik dengan Instansi dan pelaksana terkait maupun dengan unsur Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan semua kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat koordinasi dengan Cab.Din/UPT se Kecamatan ; 2. Raker dengan Kades, Perangkat Desa dan BPD serta LPM ; 3. Penyelesaian perdes dan LPJ Kades ; 4. Fasilitasi penerimaan TPAPD 5. Tunjangan BPD 6. Tunj. Puma Bhakti 	3 12 12 44 1.168.400.000 59.600.000 3.000.000	3 12 12 44 1.168.400.000 59.600.000 3.000.000	100 100 100 100 100 100
3	Terselenggaranya koordinasi pembangunan secara konsisten guna peningkatan perekonomian masyarakat;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat koordinasi pembangunan dengan Cab.Din/UPT se kecamatan ; 2. Jumlah laporan kegiatan pembangunan ; 3. Fasilitasi & monitoring pelaksanaan proyek bantuan ADD dan Bansun; 4. Stimulan pemb. desa 5. Monitoring pelaksanaan proyek sistem swakelola dan kontraktual 	12 2 6 12 1.067.616.000 15.000.000 997.000.000	12 2 6 12 1.067.616.000 15.000.000 997.000.000	100 100 100 100 100
4	Terjalinnya koordinasi peningkatan kesejahteraan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi distribusi RASKIN ; 2. Pelaporan penerima RASKIN ; 3. Pembinaan Pemuda & Olah Raga 	2.474 KK Miskin 12 16 3.600.000	2.474 KK Miskin 12 16 3.600.000	100 100 100 100

1	2	3	4	5	6
5	Terwujudnya tertib administrasi umum di Sekretariat Kecamatan NGIMBANG ;	1. Kegiatan kamtibmas 2. Jumlah pemantauan KAMTIBMAS dengan aparat keamanan ke desa ; 3. Frekuensi inspeksi ijin usaha/HO dan sejenisnya ke perusahaan-perusahaan yang ada di Kecamatan NGIMBANG ; 4. Optimalisasi pelunasan pajak 5. Retribusi Daerah 6. Pemantauan dan pengawasan distribusi pupuk	19.800.000 4 24 420.545.748 2.445.200 Setiap ada distribusi pupuk	19.800.000 4 24 420.545.748 2.445.200 Setiap ada distribusi pupuk	100 100 100 100 100

Jumlah Anggaran selama tahun 2011 Rp. 3.512.619.000,- (Tiga Milyard Lima ratus dua belas Juta enam ratus Sembilan belas ribu rupiah).

Dari upaya-upaya dimaksud kami sangat menyadari belum mampu memuaskan semua fihak. Beberapa kendala yang terjadi sejak tahun 2011 antara lain dapat dirumuskan :

- a. Masih adanya egoisme sektoral UPT. Dinas / Instansi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehingga dari kondisi ini dapat berdampak kepada singkronisasi tujuan akhir pembangunan ;
- b. Koordinasi yang dilakukan oleh stake holder (kontraktor) berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan masih perlu peningkatan ;
- c. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah yang ada di Sekretariat Kecamatan NGIMBANG ;
- d. Terbatasnya SDM unsur Pemerintahan Desa ;
- e. Terbatasnya sarana dan prasarana kerja unsur Pemerintahan Desa ;
- f. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 belum berjalan secara maksimal.

c. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Adalah digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Instansi Pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Dalam pengukuran Kinerja tidak terlepas dari faktor internal dan faktor eksternal yang ada di Wilayah Kecamatan NGIMBANG. Faktor internal antara lain meliputi Jumlah, SDM Perangkat Daerah yang ada di Sekretariat Kecamatan NGIMBANG, sarana dan prasana kerja

maupun dukungan dana. Sedangkan faktor eksternal antara lain meliputi Jumlah dan SDM unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa, tuntutan masyarakat maupun era globalisasi.

Analisa capaian kinerja Unit Kerja Kantor Kecamatan NGIMBANG dalam tahun 2011 secara rinci dapat dilihat pada lampiran Pengukuran Kinerja .

Dalam melaksanakan kegiatan guna mencapai misi selama tahun 2011, maka dapat dilakukan evaluasi sebagai berikut :

1. Pengurusan administrasi Ketatausahaan, Kepegawaian, Perlengkapan dan Rumah Tangga , dengan indikator meliputi jumlah surat masuk dan keluar, jumlah laporan kepegawaian dan jumlah barang inventaris yang dilaporkan kesemuanya telah dapat dilaksanakan, meskipun disadari oleh karena keterbatasan tenaga administrasi (PNS) di bawah koordinasi Sekretaris Kecamatan hanya 1 (satu) orang terkadang pelaporannya sedikit terlambat. Untuk mengatasi kekurangan staf yang ada di bawah koordinasi Sekcam yaitu mengoptimalkan staf yang ada. Pengusulan Kenaikan pangkat bagi PNS telah dilaksanakan sesuai ketentuan/ periodeisasi.
2. Pengurusan Pemerintahan Umum dan fasilitasi Pemerintahan Desa dengan indicator meliputi Rapat koordinasi dengan Kepala Cabang Dinas / Unit Pelaksana Tehnis se Kecamatan NGIMBANG, rapat kerja dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), pengurusan masalah kependudukan, administrasi pemerintahan dan keagrariaan serta pembinaan kelembagaan pemerintahan di desa telah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat NGIMBANG Nomor 188/24/Kep/413.317/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Penyelenggaraan Rapat koordinasi Kepala Cabang/Dinas/Instansi/UPT dan Konferensi Dinas Kepala Desa, BPD,Sekretaris Desa,Kepala Seksi dan Kepala Urusan pada Sekretariat Desa dan Kepala Dusun se Kec. NGIMBANG tahun 2011. Dalam kegiatan ini terdapat 1 (satu) hal seiring dengan era demokratisasi, yakni tingkat kehadirannya tidak bisa maksimal. Upaya yang kami lakukan menghadapi situasi yang demikian adalah mengadakan pemanggilan kepada yang bersangkutan.

Fasilitasi terhadap kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan melakukan pembinaan ke desa. Pemberian petunjuk kepada 19 (Sembilan belas) Kepala Desa mengenai pengisian register sesuai Tupoksi masing-masing Perangkat Desa, penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2011 dan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban 2011 termasuk fasilitasi pengisian lowongan Jabatan Perangkat Desa dengan tindaklanjut pembentukan Panitia Paneliti dan Penguji Perangkat Desa melalui Keputusan Kepala Desa dalam setiap melakukan pengisiannya, disamping itu terhadap perubahan aturan masalah pemerintahan Desa sebagaimana Undang-Undang 32 Tahun 2004 pemerintah Desa telah membuat aturan

penyesuaian jabatan disesuaikan dengan aturan yang saat ini menjadi pedoman pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Desa.

Selanjutnya terhadap mekanisme pemerintahan desa di Kecamatan NGIMBANG telah dilaksanakan dengan baik karena semua desa telah mengisi jabatan Perangkat Desa

diselenggarakan secara jujur dan adil serta tidak terjadi konflik dalam pelaksanaannya. Selama Tahun 2011 terdapat 6 (enam) Desa yaitu Desa Ganggangtingan, Purwokerto, Ngimbang, Cerme, Jejet dan Gebangangkrik sedangkan dalam rencana kegiatan 2011 adalah pemenuhan organisasi dan tata kerja sesuai pola maksimal pemerintahan desa dan pengisian lowongan perangkat desa yang hingga pada tahun 2011 belum terisi (sesuai Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa).

Pengurusan Rapat koordinasi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, dengan indikator meliputi frekuensi rapat koordinasi pembangunan dengan UPT Dinas se Kecamatan NGIMBANG, Jumlah laporan kegiatan pembangunan dan terbangunnya sarana dan prasarana fisik desa yang bersumber dari dana APBN, APBD Propinsi dan APBD Kab. Lamongan serta usulan pembangunan sarana fisik desa, Terhadap kegiatan dimaksud selama Tahun 2011 telah dilaksanakan rapat Koordinasi Perencanaan, Rapat Koordinasi Pelaksanaan, dan rapat koordinasi Pengawasan Pembangunan, maupun rapat koordinasi Evaluasi. Kegiatan rapat / musyawarah telah dapat berjalan dengan baik dan hasilnya secara rutin (selesai rapat) selalu dilaporkan kepada Bupati Lamongan, namun terkadang dari usulan yang diajukan, dimana usulan dimaksud merupakan rekapitulasi usulan dari bawah (Bottom up planning) tidak seluruhnya membawa hasil (disetujui). Dalam kaitan ini kami sangat menyadari karena disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sedangkan terkait dengan pengawasan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana fisik desa telah terbangun jalan poros desa dan jembatan sesuai bestek yang ada. Pelaporan juga dilakukan sesuai ketentuan.

4. Pengurusan dan fasilitasi distribusi RASKIN dengan indikator Frekuensi pemantauan distribusi beras untuk KK miskin (RASKIN) dan Pelaporan penerima RASKIN, Terhadap fasilitasi distribusi beras untuk KK miskin (RASKIN) setiap KK mendapat jatah beras tiap bulan sebanyak 15 (Lima belas) Kg telah berjalan dengan baik dan lancar. Adapun jumlah KK katagori miskin penerima beras bersubsidi se Kecamatan selama tahun 2011 adalah 2.474 KK. Dengan demikian jumlah beras yang tersalur di Kecamatan NGIMBANG adalah sebanyak 37.110 Kg tiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.

Dalam upaya meningkatkan peningkatan fasilitas kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Lamongan utamanya masyarakat kurang mampu pemerintah Kabupaten mengeluarkan kebijaksanaan pengobatan jalan gratis bagi masyarakat Lamongan yang dalam syarat administrasi hanya menunjukkan kartu identitas penduduk (KTP) dan kartu ASKESKIN serta ASKESDA saja sedangkan fasilitas lain bagi masyarakat miskin adalah pemberian Bea siswa bagi warga Miskin sejumlah 18 selama tahun 2011.

5. Pengurusan pemantauan Situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban maupun penegakan Peraturan Daerah, dengan indikator meliputi Jumlah pemantauan KAMTIBMAS dengan aparat Keamanan ke desa, Frekuensi inspeksi kepemilikan ijin usaha/HO dan sejenisnya ke perusahaan perusahaan yang ada di Kecamatan NGIMBANG dan Optimalisasi pelunasan pajak dan retribusi daerah . Pemantauan situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat telah secara rutin dilakukan ke desa-desa se Kecamatan bersama dengan aparat keamanan (POLSEK dan Koramil) secara sinergi, bantuan pertama terhadap bencana alam atau bencana lainnya, pengamanan kantor dan tamu penting lainnya serta operasi penegakan perda, dalam kaitan ini terdapat satu kendala yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, bahwa aktifitas penjagaan Keamanan Lingkungan (KAMLING) cenderung menurun. Sedangkan upaya kami adalah tetap menekankan kepada seluruh

Kepala Desa agar pelaksanaan SISKAMSWAKARSA tetap dilakukan. Sedangkan terhadap upaya pelunasan PBB dari baku tahun 2011 sebesar Rp.595.463.307,- (Lima ratus Sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh rupiah) telah lunas sebelum tanggal jatuh tempo kemudian terhadap PAD lainnya berupa Pajak Galian C 2011 untuk Kecamatan NGIMBANG telah dihapus, Pelaporan dan inventarisasi subyek dan obyek pajak retribusi baru senantiasa kami cukupi sesuai dengan permintaan dan situasi.

Selama Tahun anggaran 2011 dengan program kegiatan dan sasaran yang dilaksanakan dalam upaya untuk mencapai tujuan suatu organisasi, maka berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada kami telah berupaya semaksimal mungkin guna mewujudkan tercapainya good governance di Unit Kerja Kecamatan NGIMBANG.

d. Akuntabilitas Keuangan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALIASASI	%
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya tertib administrasi umum di Sekretariat Kecamatan NGIMBANG ;	1. Penyusunan Laporan Kinerja & Keuangan 2. Pelayanan adm. Perkantoran 3. Peningkatan Sarana & Prasarana	15.000.000 119.803.000 43.600.000	15.000.000 119.803.000 43.600.000	100 100 100
2	Terciptanya koordinasi yang baik dengan Instansi dan pelaksana terkait maupun dengan unsur Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan semua kegiatan	1. Fasilitasi penerimaan TPAPD 2. Tunjangan BPD 3. Tunjangan Puma Bhakti Perangkat	1.168.400.000 59.600.000 3.000.000	1.168.400.000 59.600.000 3.000.000	100 100 100
3	Terselenggaranya koordinasi pembangunan secara konsisten guna peningkatan perekonomian masyarakat;	1. Fasilitasi & monitoring pelaksanaan proyek bantuan ADD dan Bansun; 2. Stimulan pemb. desa 3. Monitoring pelaksanaan proyek sistem swakelola dan kontraktual/Proyek PNPM	1.067.616.000 15.000.000 997.000.000	1.067.616.000 15.000.000 997.000.000	100 100 100
4	Terdapatnya koordinasi peningkatan kesejahteraan masyarakat	1. Pembinaan Pemuda & Olah Raga	3.600.000	3.600.000	100
5	Tercapainya peningkatan ketentraman dan ketertiban.	1. Jumlah pemantauan KAMTIBMAS dengan aparat keamanan ke desa inspeksi ijin usaha/HO dan sejenisnya ke perusahaan-perusahaan yang ada di Kecamatan NGIMBANG; 2. Optimalisasi pelunasan pajak 4. Retribusi Daerah	19.800.000 420.545.748 2.445.200	19.800.000,- 420.545.748 2.445.200	100 100

Jumlah Anggaran yang terserap selama tahun 2011 Rp. 3.512.619.000,- (Tiga Milyard Lima ratus dua belas Juta enam ratus Sembilan belas ribu rupiah) .

Sedangkan program/kegiatan lain yang ditangani UPT Dinas, sesuai dengan mekanisme yang ada antara lain melalui rapat dinas dan diskusi selalu ditekankan agar benar-benar dilaksanakan sebagaimana aturan yang ada .

Untuk pengrajaan fisik proyek yang bersifat kontraktual, kami hanya memfasilitasi saja karena kewenangan ada pada pemimpin kegiatan maupun KP-3 .

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan NGIMBANG dibuat sebagai pelaksanaan dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1999, yang mengamanatkan setiap Instansi Pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya masing-masing dalam rangka mewujudkan terciptanya good governance, diwajibkan membuat laporan akuntabilitas kinerja sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pejabat yang memberi tugas. Oleh karena itu Pertanggungjawaban yang kami paparkan di depan adalah pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan.

Pada Tahun Anggaran 2011 Unit Kerja Kantor Kecamatan NGIMBANG telah melakukan berbagai kegiatan sebagai sarana untuk mencapai misi organisasi, namun didalam pelaksanaannya meskipun telah melalui perhitungan dan koordinasi yang cermat serta berkesinambungan masih belum dapat memuskan semua fihak.

1. KELEMAHAN :

- a. Sumber Daya Perangkat Daerah belum seimbang dengan tuntutan era global dan jumlahnya yang sedikit jika dibandingkan dengan jumlah desa yang ada
- b. Sumber Daya Penyelenggara Pemerintahan Desa relatif rendah ;
- c. Standar mentalitas Pamong Praja belum ada ;
- d. Masih adanya rasa egoisme sektoral Instansi dan UPT Dinas ;
- e. Kesejahteraan PNS dan Unsur Pemerintah Desa perlu ditingkatkan ;
- f. Camat tidak memiliki kewenangan untuk mengambil sanksi terhadap Perangkat Desa.

2. TANTANGAN / ANCAMAN :

- b. Tuntutan masyarakat terhadap kinerja Aparatur penyelenggara Pemerintahan semakin tinggi ;
- c. Penyelenggaraan Pemerintahan yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;
- d. Pelayanan Prima ;
- e. Globalisasi .

Kiranya dari pengalaman keberhasilan dan kekurangan yang terjadi selama Tahun Anggaran 2011, akan kamijadikan pemicu untuk berbuat lebih baik dalam Tahun Anggaran 2012, sehingga tujuan terciptanya good governance dan membangun Lamongan lebih baik dan maju akan terwujud .

L A M P I R A N

TUJUAN					
SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KETERANGAN					
1.	2	3	4	5	6
1. Mengikuti kualitas administrasi pengelolaan sumber daya manusia;	a. Jumlah surat masuk dan keluar yg ditangani;	b. Jumlah laporan kepegawaian;	c. Penggunaan peralatan teknologi informasi;	d. Penggunaan peralatan dan fasilitas administrasi umum;	e. Mengikuti kualitas administrasi pengelolaan sumber daya manusia;
2. Mengikuti kualitas kecamatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;	a. Jumlah raker dengar kades, BPD dan Dinas/Linstas; b. Dinas/linstas;	c. Pelaksanaan administrasi pembinaan dan pemantauan;	d. Pelaksanaan administrasi pembinaan dan pemantauan;	e. Pelaksanaan administrasi pembinaan dan pemantauan;	f. Pelaksanaan administrasi pembinaan dan pemantauan;
3. Mengikuti kualitas pelaksanaan administrasi pembinaan dan pemantauan;	a. Jumlah Raker koordinasi dengar Kajupit Dinas/linstas dan pelaksanaan masarakat;	b. Frekuensi pengawasan pelaksanaan masarakat;	c. Pelaksanaan pelengkapan pelaksanaan masarakat;	d. Pelaksanaan pelengkapan pelaksanaan masarakat;	e. Pelaksanaan pelengkapan pelaksanaan masarakat;
4. Mengikuti kualitas pelaksanaan administrasi pembinaan dan pemantauan;	a. Pelaksanaan pelengkapan pelaksanaan masarakat;	b. Pelaksanaan pelengkapan pelaksanaan masarakat;	c. Pelaksanaan pelengkapan pelaksanaan masarakat;	d. Pelaksanaan pelengkapan pelaksanaan masarakat;	e. Pelaksanaan pelengkapan pelaksanaan masarakat;

FORMULARIS

RENCANA STRATEGIK
Tahun 2011

Instansi : Kecamatan NGIMBANG
Visi : Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan ;
Misi : a. Mengikuti kualitas Pemerintahan yang bersih dan akuntabel penyelenggaraan Administrasi Umum ;
b. Mengikuti kualitas Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa ;
c. Mengikuti kualitas Perkonomian Masyarakat Melalui Optimalisasi Pemerintahan Masyarakat ;
d. Mengikuti kualitas Pemerintahan Umum di Bidang Kesejahteraan Sosial ;
e. Mengikuti kualitas Kesejahteraan Sosial Masyarakat Melalui Pelayanan Umum di Bidang Kesejahteraan Sosial ;

- Misi : a. Mengikuti kualitas Penyelelanggaran Administrasi Umum ;
b. Mengikuti kualitas Pemerintahan yang bersih dan akuntabel penyelenggaraan Administrasi Umum ;
c. Mengikuti kualitas Perkonomian Masyarakat Melalui Optimalisasi Pemerintahan Masyarakat ;
d. Mengikuti kualitas Pemerintahan Umum di Bidang Kesejahteraan Sosial ;
e. Mengikuti kualitas Kesejahteraan Sosial Masyarakat Melalui Pelayanan Umum di Bidang Kesejahteraan Sosial ;

- Misi : a. Mengikuti kualitas Penyelelanggaran Administrasi Umum ;
b. Mengikuti kualitas Pemerintahan yang bersih dan akuntabel penyelenggaraan Administrasi Umum ;
c. Mengikuti kualitas Perkonomian Masyarakat Melalui Optimalisasi Pemerintahan Masyarakat ;
d. Mengikuti kualitas Pemerintahan Umum di Bidang Kesejahteraan Sosial ;
e. Mengikuti kualitas Kesejahteraan Sosial Masyarakat Melalui Pelayanan Umum di Bidang Kesejahteraan Sosial ;

1	2	3	4	5	6
5. Meningkatkan ketertiban kehidupan emasyarakat.	5. Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> a. Terseleggaranya jaga Pos Kampling di semua Desa sampai tigkat RT; b. Jumlah laporan situasi dan kondisi Kecamatan ; c. Monitoring situasi dan kondisi ketenetrman dan ketertiban di semua desa ; d. Penegakan Peraturan Daerah dan pelunasan pajak dan retribusi daerah. e. Pentauan penyaluran Puplik Bersubsidi 		5. Pemantauan situasi dan kondisi ketenetrman dan ketertiban Kecamatan maupun pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah.	

NGIMBANG, Januari 2012



DRS. DIANTO HARI WIBOWO,
Pembina
NIP. 19760410 199412 1 002

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2011

Instansi : kecamatan NGIMBANG

FORMULIR RKT

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KET
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Meningkatnya pengelolaan administrasi surat menyurat lingkup Kecamatan NGIMBANG ;	a. Jumlah surat masuk dan keluar yang ditangani ; b. Jumlah laporan kepegawaian ; c. Pembinaan administrasi umum ; d. Pemrosesan kenalkan Gaji Berkala	528 srt 120 srt 12 kali 3 orang	1. Pelayanan administrasi ke sekretariatan ;	1. Pengurusan Adm.ke-TU-an, Kepegawaian, perlengkapan dan Rumah Tangga ; 2. Pelaksanaan koordinasi penyelegaraan Perintahannya umum dan Desa serta fasilitasi distribusi TPAPD Kades & Perangkat Desa serta tunjangan bagi BPD .	Input : SDM : Out Put : 1. Jumlah surat masuk dan keluar 2. Jumlah Laporan kepegawaian ; 3. Jumlah laporan barang Inv. Proses gaji Input : SDM : Out Put 1. Rapat koordinasi dengan UPT Dinas/Instansi se Kec. ; 2. Raker dengan Kades, Perangkat Desa dan BPD serta LPMT ; 3. Fasilitasi Penyelesaian Perdes dan LPJ Kades ; 4. Fasilitasi penerimaan TPAPD bagi Kades & Perangkat Desa serta Tunjangan BPD . Tunjangan Puma Bhakti	Orang surat Kali Jenis Orang	2 528 12 4	
2. Meningkatnya kualitas pelaksanaan rapat kerja dengan dinas/instansi dan UPT tingkat Kecamatan dan pelaksanaan rapat kerja Kades, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	a. Jumlah rapat koordinasi dengan Ka.UPT Dinas/Instansi ; b. Jumlah raker dengan Kades, BPD dan Perangkat Desa ; c. Intensitas pembinaan administrasi Pemerintahan Desa ; d. Tersalurnya TPAPD bagi Kades & Perangkat Desa serta tunjangan Anggota BPD .	12 kali 12 kali 12 kali semua Kades & Anggota BPD	2. Pelaksanaan koordinasi penyelegaraan Perintahannya umum dan Desa serta fasilitasi distribusi TPAPD Kades & Perangkat Desa serta tunjangan bagi BPD ;	3. Pelaksanaan dan pengadministrasian rapat Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta fasilitasi & monitoring proyek masuk desa ;	SDM : Out Put 1. Rapat koordinasi dengan UPT Dinas/Instansi se Kec. ; 2. Raker dengan Kades, Perangkat Desa dan BPD serta LPMT ; 3. Fasilitasi Penyelesaian Perdes dan LPJ Kades ; 4. Fasilitasi penerimaan TPAPD bagi Kades & Perangkat Desa serta Tunjangan BPD . Tunjangan Puma Bhakti SDM : Out Put 1. Rapat koordinasi Pembangunan dengan UPT Dinas/Instansi se Kec ; 2. Jumlah laporan kegiatan Pembangunan ; 3. Fasilitasi penerimaan Dana ADD dan Bansus 4. Tunj. Puma Bhakti 5. Monitoring pelaksanaan proyek sistem swakelola dan kontraktual	Orang Kali Kali Buku Rupiah Rupiah Rupiah Orang	3 12 12 44 1.168.400.000 59.600.000 3.000.000 2 6 12 11.067.616.000 15.000.000 997.000.000	
3. Meningkatnya efektifitas perencanaan dan pengendalian maupun evaluasi pembangunan di Kecamatan NGIMBANG ;	a. Jumlah rapat koordinasi dengan Ka.UPT Dinas/Instansi dan Kades, BPD, Tokoh Masyarakat ; b. Frekuensi pengawasan pelaksanaan pembangunan ; c. Frekuensi pelaporan dan pelaksanaan pembangunan ; d. Terbangunnya sarana dan prasarana fisik desa dari dana APBN, APBD Prop. & APBD Kabupaten ;	3 kali 6 kali 12 kali semua desa						

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014
KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN

NO	PROGRAM UTAMA	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUT PUT		INDIKATOR KINERJA OUT COME		ANGGARAN
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1. Peningkatan peran serta Kepemudaan	Pemuda di 19 Desa.	Terlaksananya pembinaan Kepemudaan di Kecamatan Ngimbang.	70 %	Meningkatnya peran serta Kepemudaan di Kec. Ngimbang.	75 %	Rp. 3.600.000,-
2.	BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI. 1. Peningkatan dan Kenyamanan Lingkungan.	19 Desa di Wilayah Kecamatan Ngimbang.	Terlaksananya pengendalian keamanan dan lingkungan.	75 %	Tercapainya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	80 %	Rp. 19.800.000,-
3.	BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN. 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kantor Kecamatan Ngimbang. 2. Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Terbayarnya tagihan jasa komunikasi, Sumberdaya air, dan Listrik.	100%	Terbayarnya tagihan jasa komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik tepat waktu.	100%	Rp. 3.000.000,-
		Kegiatan pelayanan Administrasi Kantor Kecamatan Ngimbang. 3. Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Adanya peralatan dan perengkapan Kantor yang dibutuhkan.	100 %	Tersedianya peralatan dan perengkapan Kantor yang dapat beroperasi dengan baik.	100 %	Rp. 12.000.000,-
			Terbitnya STNK Kendaraan Dinas Roda 4.	100 %	Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan penjagaan kendaraan dinas/operasional.	100 %	Rp. 175.000,-
			Buku Cek Bank	100 %	Tercapainya kualitas pelayanan administrasi Keuangan.	100 %	Rp. 1.500.000,-
			Penyediaan ATK.	100 %	Terpenuhinya ATK.	100 %	Rp. 20.000.000,-
			Kebutuhan Barang Cetak dan penggandaan	100 %	Terpenuhinya kebutuhan barang Cetak dan penggandaan di Kantor.	100 %	Rp. 31.000.000,-
			Komponen instalasi Listrik/ penerangan bangunan Kantor.	100 %	Terpenuhinya komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor.	100 %	Rp. 2.520.000,-
			Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	100 %	Terpenuhinya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.	100 %	Rp. 3.132.000,-
			Peningkatan SDM dan Wawasan Aparatur.				

1	2	3	4	5	6	7	8
	9. Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Kegiatan Rapat-rapat dinas.	Makanan dan Minuman rapat.	100 %	Terpenuhinya makanan dan minuman rapat.	100 %	Rp. 21.420.000,-
	10. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jasa tenaga Administrasi teknis/kegiatan.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis kegiatan	100 %	Meningkatnya pelayanan Jasa Administrasi Teknis/ Kegiatan.	100 %	Rp. 25.050.000,-
	11. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Peralatan Gedung Kantor.	Komputer dan Printer.	100 %	Terlaksananya Tugas-tugas Administrasi Perkantoran.	100 %	Rp. 16.000.000,-
	12. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Gedung Kantor.	Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor	100 %	Terjaganya kualitas bangunan Kantor.	100 %	Rp. 13.200.000,-
	13. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Kendaraan dinas/ operasional.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil dinas/operasional.	100 %	Terjaganya kondisi yg Laik jalan untuk kendaraan dinas/ operasional.	100 %	Rp. 14.400.000,-
	14. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Gedung Kantor.	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD.	100 %	Terselenggaranya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja.	100 %	Rp. 5.000.000,-
	15. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Gedung Kantor	Laporan Keuangan Semesteran.	100 %	Terselenggaranya laporan keuangan semesteran yang tepat waktu.	100 %	Rp. 5.000.000,-
	16. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Pelaksana/ Pengguna Anggaran.	Laporan Keuangan Akhir Tahun.	100 %	Terselenggaranya laporan keuangan akhir tahun yang tepat waktu.	100 %	Rp. 5.000.000,-
4.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.	Pelaksana/ Pengguna Anggaran.	Adanya pertisipasi masyarakat dalam membangun desa.	100 %	Adanya peningkatan partisipasi masyarakat dlm membangun desa	100 %	Rp. 15.000.000,-

Mengetahui :



Ngimbang, Januari 2011

CAMAT NGIMBANG

DRS. DIANTO HARI WIBOWO.
 Pembina
 NIP. 19760410 199412 1 002



PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2011

Instansi : Kecamatan NGIMBANG

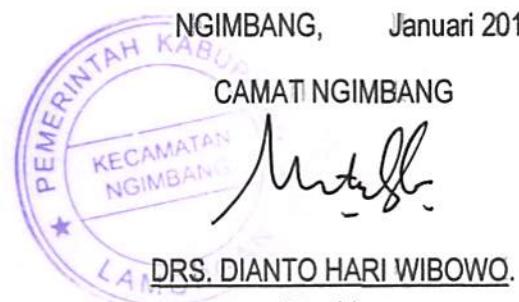
Formulir PKK

PROGRAM	KEGIATAN					PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET
	URAIAN	INDIKATOR	SATU AN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Pelayanan administrasi kesretarifatan ;	1. Pengurusan adm Ke-TU-an, Kepegawaian, Perlengkapan & Rumah Tangga ;	Input : SDM Output : 1. Jumlah surat masuk dan keluar ; 2. Jumlah Laporan kepegawaian ; 3. Jumlah laporan barang Inventaris ; 4. Penrosesan gaji berkala	Orang	2	2	100%	
2. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan fasilitasi Pemerintahan Desa ;	2. Pengurusan Pemerintahan Umum dan fasilitasi Pemerintahan Desa ;	Input : SDM Output : 1. Rapat koordinasi dengan Cab.Din/UPT se Kecamatan ; 2. Raker dengan Kades, Perangkat Desa dan BPD serta LPM ; 3. Penyelesaian perdes dan LPJ Kades ; 4. Fasilitasi penerimaan TPAPD dan Tunjangan BPD	Orang	3	3	100%	
3. Pelaksanaan dan pengadministrasi- sian rapat koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan ;	3. Pengurusan rapat koordinasi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan ;	Input : SDM Output : 1. Rapat koordinasi pembangunan dengan Cab.Din/UPT se kecamatan ; 2. Jumlah laporan kegiatan pembangunan ; 3. Fasilitasi & monitoring pelaksanaan proyek bantuan ADD dan Bansun ; 4. Monitoring pelaksanaan proyek sistem swakelola dan kontraktual	Orang	2	2	100%	

1	2	3	4	5	6	7	8
4. Pelaksanaan dan Pengadministrasian distribusi untuk KK miskin maupun pelayanan ASKESKIN ;	4. Pengurusab dan fasilitasi distribusi RASKIN serta Pelayanan ASKESKIN ;	Input : SDM Output : 5. Fasilitasi distribusi RASKIN ; 6. Pelaporan penerima RASKIN ; 7. Penerima bea siswa	Orang Rupiah kali Penerima	2 37.110/bulan 12 16	2 37.110/bulan 12 16	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	
5. Pemantauan Situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban kecamatan maupun pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah.	5. Pengurusan pemantauan situsasi dan kondisi ketentranman dan ketertiban maupun penegakan Peraturan Daerah.	Input : SDM Output : 1. Jumlah pemantauan KAMTIBMAS dengan aparat keamanan ke desa ; 2. Frekuensi inspeksi ijin usaha/HO dan sejenisnya ke perusahaan-perusahaan yang ada di Kecamatan NGIMBANG ; 3. Optimalisasi pelunasan pajak dan retibusi daerah. 4. Pemantauan dan pengawasan distribusi pupuk	Rupiah Orang Kali Kali Rupiah Kali	19.800.000 4	19.800.000 4	100 %	

NGIMBANG, Januari 2012

CAMAT NGIMBANG

DRS. DIANTO HARI WIBOWO.

Pembina
NIP. 19760410 199412 1 002

Instansi : Kecamatan NGIMBANG

PENGUKURAN KINERJA
Tahun 2011

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulir PPS		
		RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN
1	2	3	4	5
1. Terwujudnya teritib administrasi umum di Sekretariat Kecamatan NGIMBANG ;	a. Jumlah surat masuk dan keluar yang ditangani ; b. Jumlah laporan kepegawaian ; c. Pembinaan administrasi umum ; d. Pemrosesan kenaikan gaji berkala.	528 srt 36 jenis srt 12 kali 3 orang	528 srt 36 jenis srt 12 kali 3 orang	100 % 100 % 100 % 100 %
2. Terciptanya koordinasi yang baik dengan Instansi dan pelaksana terkait maupun dengan unsur Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan semua kegiatan ;	a. Jumlah rapat koordinasi dengan Kacabdin/Instansi b. Jumlah raker dengan Kades, BPD dan Perangkat Desa ; c. Intensitas Pembinaan administrasi Pemerintahan Desa ; d. Tersalurnya TPAPD bagi Kades & Perangkat Desa dan Anggota BPD	12 kali 12 kali 12 kali semua kades & PD serta BPD	12 kali 12 kali 12 kali semua desa	100 % 100 % 100 % 100 %
3. terselenggaranya koordinasi pembangunan secara konsisten guna peningkatan perekonomian masyarakat;	a. BPD Tokoh Masyarakat ; b. Freskuensi pengawasan pelaksanaan pembangunan ; c. Frekuensi pelaporan pelaksanaan pembangunan ; d. Terbangunnya sarana & prasarana fisik desa dari dana APBN, APBD Prop dan APBD Kab.	3 kali 6 kali 12 kali	3 kali 6 kali 12 kali	100 % 100 % 100 %
4. Terdapatnya koordinasi peningkatan kesejahteraan masyarakat ;	Tersalurnya distribusi RASKIN, Kartu JAMKESMAS	semua desa KK miskin	PM kk miskin	PM 100 %
5. Tercapainya peningkatan ketentraman dan ketertiban.	a. Penerima Bea siswa b. Terselempgarannya jaga pos kamling di semua desa sampai tingkat RT ;	18 orang 12 kali	kk Penerima 12 kali	100 % 100 %
	a. b. c. d.	Jumlah laporan situasi dan kondisi kecamatan ; Monitoring situasi & kondisi ketentraman & ketertiban di semua desa ; Penegakan Peraturan Daerah dan pelunasan pajak dan retribusi daerah .	12 kali 12 kali PBB lunas sbl jatuh tempo	12 kali 12 kali PBB lunas

NGIMBANG, Januari 2012

CAMAT NGIMBANG
[Signature]

DRS. DIANTO HARI WIBOWO.

Pembina
NIP. 19760410 199412 1 002

LAMONG